

PEMANFAATAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI (SIA) DALAM MENINGKATKAN KINERJA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) DI KABUPATEN GORONTALO

Felmi D. Lantowa^{1*}, Fitri Melynsyah Yusuf¹

¹ Program Studi Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Gorontalo

*e-mail: felmi.lantowa@umgo.ac.id

Abstrak

Sistem Informasi Akuntansi (SIA) yang akan di berikan pelatihan dan pendampingan penggunaannya kepada para pengurus BUMDes se Kabupaten Gorontalo yaitu sistem informasi akuntansi sebagaimana yang diatur dalam PP Nomor 11 Tahun 2021 pasal 58 tentang pertanggungjawaban BUMDes. Tujuan jangka pendek adalah untuk memenuhi kebutuhan pengurus BUMDes akan suatu sistem atau alat yang digunakan dalam melakukan pengelolaan keuangan BUMDes sesuai prinsip akuntansi yang berlaku. Pendekatan metode yang digunakan untuk menerapkan solusi yaitu metode diklat dan pendampingan, dengan melakukan empat tahapan penting yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan, tahap monitoring dan evaluasi serta tahap pendampingan. Hasil dari kegiatan ini adalah respon peserta pada kegiatan ini sangat baik, hal ini dapat di lihat dari antusias peserta dalam sesi tanya jawab baik pada materi tentang sehat finansial dalam mengelola keuangan BUMDes maupun pada materi pencatatan laporan keuangan dengan menggunakan SIA. Pertanyaan peserta dilatarbelakangi dengan kondisi keuangan pada usaha yang mereka kelola dan komitmen untuk melakukan pengelolaan keuangan ke arah yang lebih baik, Hal ini mereka lakukan sebagai bentuk upaya untuk memperbaiki pengelolaan keuangan terutama pencatatan laporan keuangan mereka yang menurut mereka pencatatannya masih terbatas pada kas masuk dan kas keluar.

Kata Kunci: BUMDes; Pengelolaan Keuangan; SIA

Abstract

The Accounting Information System (SIA) that will be provided with training and assistance in its use to BUMDes administrators throughout Gorontalo Regency, namely the accounting information system as stipulated in PP Number 11 of 2021 article 58 concerning BUMDes accountability. The short-term goal is to meet the needs of BUMDes management for a system or tool used in managing BUMDes finances in accordance with applicable accounting principles. The method approach used to implement the solution is the training and mentoring method, by carrying out four important stages, namely the preparation stage, the implementation stage, the monitoring and evaluation stage and the mentoring stage. The result of this activity was that the participants' response to this activity was very good. This can be seen from the enthusiasm of the participants in the question and answer session both on material about financial health in managing BUMDes finances and on material for recording financial reports using SIA. The participants' questions were motivated by the financial condition of the business they manage and the commitment to carry out financial management in a better direction go out.

Keywords: BUMDes; Financial Management; SIA

A. Pendahuluan

Indonesia dalam segi pemerintahan terus mengupayakan peningkatan pelaksanaan pembangunan nasional agar pembangunan daerah, desa dan juga kota sama-sama seimbang. Namun dalam pelaksanaannya masih di hadapkan dengan masalah pokok pembangunan seperti ketimpangan pembangunan antara desa dan kota. Ketimpangan tersebut terjadi dikarenakan faktor yang mempengaruhi yakni pembangunan di Indonesia tidak merata dan berdampak pada tingginya kemiskinan di Indonesia. Menghadapi permasalahan tersebut strategi pemerintah dalam mengatasi ketimpangan pembangunan yaitu dengan melaksanakan pembangunan nasional yang menaruh perhatian besar terhadap pembangunan desa. Desa sebagai ujung tombak pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, desa diberikan wewenang dan sumber dana yang memadai agar dapat mengelola potensi yang di miliki guna meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. (Nasiwan, 2012:11)

Peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat desa ini menjadi dasar pendirian BUMDes sebagaimana tertuang dalam Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADesa). Sebagai lembaga yang memiliki tujuan peningkatan ekonomi desa dalam bentuk PADesa maka pemerintah menerbitkan PP Nomor 11 Tahun 2021 tentang BUMDes.

Penerbitan Peraturan Presiden ini dimaksudkan agar dalam pelaksanaan pengelolaan BUMDes tersebut di tuntutan adanya suatu aspek pertanggungjawaban keuangan yang baik. Dimana salah satu karakteristik atau unsur utama *Good Governance* adalah akuntabilitas atau pertanggungjawaban serta adanya transparansi. Maka demikian akuntabilitas dan transparansi sangat di perlukan dalam menunjang kinerja BUMDes agar berjalan dengan baik. Akan tetapi seiring berjalannya pengelolaan BUMDes, pengurus BUMDes mengalami permasalahan dalam mengelola keuangannya hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Rahmawati (2020) Kendala utama yang dihadapi BUMDes antara lain penyertaan modal dan keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) khususnya dalam mengelola keuangan BUMDes

Hal ini juga terjadi pada BUMDes yang ada di Kabupaten Gorontalo. Dari total BUMDes sebanyak 191 BUMDes yang ada di Kabupaten Gorontalo tidak semua BUMDes yang aktif menurut data Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Kabupaten Gorontalo hanya sebesar 15% dari total keseluruhan BUMDes yang dinyatakan aktif, selain itu dari laporan BPKP atas capaian indikator kinerja utama (IKU) BUMDes yang mampu menyusun laporan keuangan pada tahun 2019 sebesar 0%, hal ini sebagaimana tergambar pada tabel 1 berikut ini:

Tabel 1. Indikator kinerja BUMDes Provinsi Gorontalo Tahun 2019

Indikator Kinerja Sasaran	Tahun 2019		
	Target	Realisasi	Capaian
BUMDes yang mampu menyusun laporan keuangan	-	-	-

Sumber: LKJ BPKP Provinsi Gorontalo, 2020

Pada tahun 2020 terdapat peningkatan jumlah BUMDes yang mampu Menyusun laporan keuangan menurut hasil laporan BPKP yakni untuk Kabupaten Gorontalo terdapat 3 BUMDes yang mampu menyusun laporan keuangan dari total keseluruhan 28 jumlah BUMDes yang aktif di Kabupaten Gorontalo. Hal ini dapat dilihat pada tabel 2 berikut ini:

Tabel 2. BUMDes yang Mampu Menyusun Laporan Keuangan

No	Kabupaten	Nama Bumdes	Laporan Keuangan			
			Neraca/LPK	Laba/Lap Hasil Usaha	Lap Arus Kas	Lap Perubahan Modal
1	Gorontalo	Anugrah	1	1	1	1
2	Gorontalo	Tunas Harapan	1	1	1	1
3	Gorontalo	Bina Usaha	1	1	1	1

Sumber: LKJ BPKP Provinsi Gorontalo, 2020

Melihat permasalahan tersebut maka diperlukan program pelatihan dan pendampingan kepada masyarakat dalam hal ini sumber daya manusia yakni pengurus BUMDes dalam mengelola keuangan BUMDes dengan memanfaatkan sistim informasi akuntansi yang berlaku sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi sehingga BUMDes yang ada di Kabupaten Gorontalo dalam pertanggungjawaban laporan keuangan sudah sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku hal ini sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan oleh Sako, Umar dan Felmi Lantowa (2018), hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh positif terhadap kualitas penyajian laporan keuangan.

B. Masalah

Permasalahan dan solusi yang ditawarkan dalam pengabdian ini dapat digambarkan pada tabel 3 berikut ini:

Tabel 3. Permasalahan, Solusi dan Output dari kegiatan PKM

No.	Permasalahan	Solusi	Output
1	Pengelolaan Keuangan BUMDes belum sesuai dengan PP Nomor 11 Tahun 2021 Pasal 58 tentang Pertanggungjawaban BUMDes. Sebagaimana hasil Evaluasi BPKP Provinsi Gorontalo yang menyatakan 3 BUMDes yang mampu Menyusun laporan keuangan dari total 191 BUMDes yang ada di Kabupaten Gorontalo	1. manajemen usaha dan Pengelolaan keuangan BUMDes sesuai sistem akuntansi	1. Seluruh BUMDes yang ada di Kabupaten Gorontalo yakni sebanyak 191 BUMDes dari 3 BUMDes pada Tahun 2020 mampu membuat laporan keuangan 2. Terciptanya tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel 3. Terciptanya prosedur pencatatan atau pengelolaan keuangan BUMDes yang sesuai kondisi BUMDes.
2	Hasil Evaluasi terhadap BUMDes se Kabupaten Gorontalo, dimana terdapat 75% BUMDes yang tidak aktif pengelolaannya dari 191 jumlah BUMDes yang ada di Kabupaten Gorontalo	1. Pelaksanaan FGD tentang tujuan pendirian BUMDes dan Tatacara Pengelolaan Keuangan BUMDes	1. Keaktifan seluruh BUMDes yang ada di Kabupaten Gorontalo sebanyak 191 Bumdes dari jumlah 28 yang aktif pada tahun 2020 atau dari 25% menjadi 100%
3	Keterbatasan Sumber daya manusia	1. Peningkatan kapasitas pengurus BUMDes melalui Pendampingan tentang cara pengelolaan BUMDes 2. Peningkatan Kompetensi SDM dengan memberikan Pelatihan tentang pengelolaan BUMDes	1. Peningkatan ketrampilan dan keahlian pengurus BUMDes dalam pengelolaan BUMDes sebagai usaha desa
4	Belum adanya sinergitas antara pihak Perguruan tinggi (Sektor Pendidikan) dengan Pihak Pemerintah dalam peningkatan kualitas Bumdes khususnya yang ada di kab Gorontalo.	1. Pendampingan dari Perguruan Tinggi dalam hal tata kelola keuangan Bumdes berbasis sistim akuntansi.	1. Terciptanya kerjasama yang menguntungkan antara Unismuh Gorontalo dan Pihak pemerintah Kabupaten Gorontalo khususnya dinas Pemberdayaan masyarakat dan desa,
5	Pencapaian PADes yang belum sesuai dengan target pemerintah Kabupaten Gorontalo.	1. Pelatihan Manajemen BUMDes	1. peningkatan PADesa melalui BUMDes yang ada di Kabupaten Gorontalo yakni 90% dari persentase 55% di Tahun 2021.

Sumber: Hasil Olah Data, 2022

Tujuan dari kegiatan PKM ini seperti yang telah tergambar pada tabel 3 di atas yakni:

1. Seluruh BUMDes yang ada di Kabupaten Gorontalo yakni sebanyak 191 BUMDes dari 3 BUMDes pada Tahun 2020 mampu membuat laporan keuangan
2. Terciptanya tata Kelola keuangan yang transparan dan akuntabel
3. Terciptanya prosedur pencatatan atau pengelolaan keuangan BUMDes yang sesuai kondisi BUMDes,
4. Keaktifan seluruh Bumdes yang ada di Kabupaten Gorontalo sebanyak 191 BUMDes
5. Peningkatan ketrampilan dan keahlian pengurus BUMDes dalam pengelolaan BUMDes sebagai usaha desa
6. Terciptanya kerjasama yang menguntungkan antara Unismuh Gorontalo dan Pihak pemerintah Kabupaten Gorontalo khususnya dinas Pemberdayaan masyarakat dan desa
7. Peningkatan PADesa melalui BUMDes yang ada di Kabupaten Gorontalo yakni 90% dari persentase 55% di Tahun 2021

C. Metode Pelaksanaan

Metode pelaksanaan kegiatan pelatihan sendiri ada beberapa hal yang perlu dilakukan diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan FGD yang akan dilaksanakan bertempat di Aula UMGo dengan mengadirkan perwakilan seluruh pengurus BUMDes dan dengan pendampingan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Kabupaten Gorontalo sebagai mitra dalam kegiatan PKM ini.
- b. Sosialisasi yang di kemas dalam bentuk workshop pengelolaan keuangan BUMDes berbasis IT, workshop ini dimaksudkan agar para pengurus BUMDes mendapatkan informasi dan gambaran mengenai sistim akuntansi yang akan diberikan pelatihannya. penyampaian materi yang mudah dipahami oleh peserta, melalui ceramah, diskusi dan tanya jawab.
- c. Pelatihan, mitra dibekali dengan keterampilan menggunakan teknologi baik dalam proses pengimputan sampai output dari pada sistim ini sehingga dapat digunakan
- d. Pembimbingan selama proses pelatihan mitra diarahkan pada penguasaan keterampilan penggunaan teknologi baik dalam proses input sampai output laporan sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan yang sesuai standar akuntansi.
- e. Pendampingan, memonitoring sejauh mitra bisa mengaplikasikan keterampilan yang didapatnya dalam penggunaan sistim akuntansi berbasis it serta memonitoring sejauh mana mitra mampu mensosialisasikan pengaplikasian teknologi ini kepada masyarakat

D. Pembahasan

Fenomena BUMDes menjadi perhatian besar pemerintah sebagai solusi untuk meningkatkan kegiatan ekonomi desa. Selain sebagai lembaga ekonomi, BUMDes juga diharapkan menjadi lembaga sosial yang dapat menyediakan pelayanan sosial kepada masyarakat (Ihsan, 2018). Kaitannya dengan hal tersebut, berdasarkan PP No.11/2021, tujuan BUMDes diantaranya sebagai berikut:

1. Meningkatkan produktifitas perekonomian desa melalui pengelolaan usaha, pengembangan investasi, dan mengoptimalkan potensi desa,
2. Melakukan kegiatan pelayanan umum melalui penyediaan barang/jasa bagi masyarakat, dan mengelola lumbung pangan desa,
3. Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PAD), dan mengoptimalkan sumber daya ekonomi masyarakat desa,
4. Pemanfaatan aset desa untuk menciptakan nilai tambah atas aset desa, dan

5. Mengembangkan ekosistem ekonomi digital di desa.

Saat ini Indonesia memiliki 83.381 desa (Data Dukcapil Kemendagri, Per Juni 2021). Namun berdasarkan data dari Kementrian Desa PDTT (bumdes.kemendesa.go.id per Maret 2023), baru terdapat 12.945 BUMDes yang telah resmi berbadan hukum. Sementara itu, sekitar 35.000 an BUMDes masih dalam tahap registrasi. Dengan demikian masih terdapat sekitar 42 persen desa yang belum memiliki BUMDes. Tidak dapat dipungkiri, pengembangan BUMDes masih mengalami banyak tantangan. Hal tersebut membuat sebagian BUMDes yang dibangun mengalami “mati suri”. Mengutip dari Kompas.com, dalam laporan yang disampaikan Presiden Joko Widodo, pada tahun 2019, sebanyak 2.188 BUMDes tidak beroperasi dan 1.670 BUMDes yang beroperasi belum berkontribusi terhadap pendapatan desa.

Menurut Aprillia dkk (2021), secara umum faktor yang mempengaruhi kegagalan dalam menjalankan kinerja BUMDesa diantaranya motivasi, pendidikan, umur, pengalaman kerja, dan gaya kepemimpinan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Jaya dan Rafi (2018) di BUMDes Rempak Maju Jaya Kecamatan Sebak Auh, Kabupaten Siak, hambatan yang dialami diantaranya a) kapasitas dan kompetensi SDM pengelola masih rendah, b) komunikasi yang tidak efektif dan arus informasi terbatas diseputaran elit desa, c) perbedaan dalam memahami aturan terkait BUMDesa, d) rendahnya partisipasi dan dukungan masyarakat, e) skala dan jangkauan usaha yang terbatas. Untuk mengatasi permasalahan ini, berdasarkan arahan Presiden Joko Widodo (2019) program revitalisasi menjadi kunci untuk mengembalikan fungsi BUMDesa dalam membangun ekonomi desa. Poin penting dalam revitalisasi BUMDes, yaitu memberikan pemahaman kepada pengelola terkait tata kelola kelembagaan, membantu pemetaan potensi pengembangan unit usaha BUMDes, penataan keuangan, dan penyusunan laporan keuangan (Bumdes.id, 2022). Tidak kalah penting, peran pendamping atau fasilitator juga menjadi perhatian dalam membantu memberikan pemahaman kepada pengelola BUMDes dan memastikan kegiatan usaha dapat berjalan.

Sebagaimana amanat UU No. 6/2020 tentang Cipta Kerja dan PP No. 11 tahun 2021, BUMDes didorong untuk menjadi lembaga berbadan hukum. Sehingga akan memberikan kesempatan memperluas kerjasama dengan pihak luar dalam mengembangkan unit usaha BUMDes. Oleh karena itu, perlu kerjasama dan komitmen semua pihak untuk menjadikan BUMDes sebagai dapur pacu dalam meningkatkan kemandirian ekonomi menuju kesejahteraan masyarakat desa. BumDes yang kreatif dan inovatif akan mampu menjawab tantangan dan strategi pengembangan desa.

Hal inilah yang menjadi dasar untuk kami dalam melakukan pelatihan dan

pendampingan khususnya dalam pengelolaan keuangan BUMDes dengan memanfaatkan sistim informasi akuntansi (SIA) yang ada di Kabupaten Gorontalo pada khususnya sehingganya diharapkan menjadi solusi yang efektif dalam permasalahan pengelolaan keuangan BUMDes. Pengelolaan BUMDES yang ada masih sangat terbatas, bukan hanya keterbatasan sumber daya manusianya dalam mengelola keuangan usaha tapi juga keterbatasan akan informasi terhadap sistim yang baik dalam pengelolaan keuangan BUMDes sehingga kurangnya pemahaman akan pentingnya pengelolaan keuangan untuk perkembangan usaha masih sangat minim. Sebagian besar para pelaku BUMDES yang menjadi peserta masih belum memisahkan pengelolaan keuangan pribadi dan pengelolaan keuangan bisnis sehingga mereka berpendapat bahwa pemisahan keuangan tersebut tidak mudah karena dianggap bahwa kinerja keuangan dapat dipantau dengan mudah jika digabung. Padahal jika tidak melakukan pemisahan keuangan maka resiko keuangan akan mengintai pada usaha yang dijalankan. Maka dari itu, sangat penting untuk melakukan pemisahan keuangan sedini mungkin karena seiring dengan berkembangnya usaha akan semakin sulit untuk melakukan pemisahan keuangan usaha dengan keuangan pribadi. Seringkali, dana dari usaha digunakan untuk keperluan pribadi juga, sehingga akan membuat laporan keuangan usaha menjadi rancu dan berantakan. Memisahkan keuangan pribadi dari keuangan usaha sangat penting karena akan membuat pembukuan usaha menjadi lebih jelas dan rapi. Selain itu, pengelola dapat lebih mudah juga melihat apakah usaha yang dijalankan benar- benar profitable, karena tidak tercampur dengan pengeluaran pribadi. Sehingga pada kegiatan pengabdian ini pemateri menyarankan untuk langkah awal penataan pengelolaan keuangan usaha agar pelaku BUMDES membuat rekening bank terpisah dari rekening pribadi begitu juga dengan pencatatannya. Berikut juga dalam pelatihan ini kami memberikan informasi pentingnya BUMDes membuat laporan keuangan karena mengingat sejauh ini modal pengembangan BUMDes bersumber dari dana desa yang akan diminta pertanggungjawabannya sesuai dengan standard akuntansi yang berlaku.

BUMDES sedikit dipermudah dengan adanya Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM) yang diterbitkan oleh IAI yang dimana SAK EMKM efektif per 1 Januari 2018 Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM). SAK EMKM dapat membantu memudahkan pelaku BUMDes dalam mengaplikasikan akuntansi pada usaha mereka sehingga dapat dengan mudah menyusun laporan keuangan sesuai dengan standart. Meskipun SAK EMKM terkesan sederhana, namun dapat memberikan informasi yang handal dalam penyajian laporan keuangan. Penyusunan laporan keuangan berdasarkan pada standart akuntansi keuangan merupakan suatu bentuk

peningkatan kualitas laporan keuangan yang akan memberikan dampak dalam peningkatan kredibilitas laporan keuangan.

Menurut IAI dalam SAK EMKM (2016:1) Entitas Mikro Kecil dan Menengah (EMKM) merupakan entitas tanpa akuntabilitas publik yang signifikan yang memenuhi definisi serta kriteria usaha mikro kecil dan menengah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan UU 20 tahun 2018 yang berlaku di Indonesia. Penerapan SAK EMKM selama dua tahun berturut-turut dalam laporan keuangan entitas disusun dengan menggunakan asumsi dasar akrual dan kelangsungan usaha, sebagaimana juga digunakan entitas selain entitas mikro kecil dan menengah serta menggunakan konsep entitas bisnis. Semua pihak sangat akan mengerti pentingnya laporan keuangan dalam usaha. Menurut IAI dalam SAK EMKM laporan keuangan minimal yang di buat oleh pelaku BUMDes adalah

1. Laporan posisi keuangan pada akhir periode
2. Laporan laba rugi selama periode
3. Catatan atas laporan keuangan, yang berisi tambahan dan rincian pos-pos tertentu yang relevan

Mengacu pada ketentuan tersebut maka kegiatan pengabdian pada masyarakat sesi ke 2 di beri tambahan latihan tentang pembuatan laporan keuangan tersebut. Agar peserta memiliki pengalaman dalam membuat laporan keuangan dan dapat mengaplikasikannya pada usaha para peserta.

E. Kesimpulan

Dari kegiatan pengabdian pemanfaatan Sistim Informasi (SIA) dalam pengelolaan keuangan BUMDes yang ada di Kabupaten Gorontalo dapat ditarik kesimpulan yakni:

1. Manfaat Sistim Informasi (SIA) dalam pengelolaan keuangan BUMDes dapat diterima oleh pengurus BUMDes dan juga aparat desa, hal ini bisa dilihat dari antusiasme peserta yang mengikuti sosialisasi ini sehingganya program ini dapat dilanjutkan.
2. Kendala utama yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan adalah pemahaman dari pengurus BUMDes tentang tatacara penggunaan sistim ini.
3. Kendala teknis yang lain masih kurangnya kemampuan dan modal serta teknologi yang masih sangat sederhana sehingganya pengelolaan dan pencatatan keuangan BUMDes masih sifatnya sangat sederhana.

F. Ucapan Terima Kasih

Penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada Diktilitbang PP Muhammadiyah yang telah memberi dukungan *financial* terhadap pengabdian ini, juga kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gorontalo serta seluruh Pengurus BUMDes yang ada di wilayah Kabupaten Gorontalo yang telah mendukung kegiatan pengabdian ini dari pengajuan proposal sampai pada tahapan pelaksanaan kegiatan ini serta ucapan terima kasih pada pihak-pihak yang telah memberikan kemudahan atau akses pada program pengabdian yang dilaksanakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adawiyah, W. R. (2011). *Faktor Penghambat Pertumbuhan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM): Studi di Kabupaten Banyumas (Artikel web)*. URL: <http://jp.feb.unsoed.ac.id/index.php/sca-1/article/view/134/139>. Diakses tanggal 5 Januari 2020.
- Afiyanti, Y., Rahmawati, I., Milanti, A. (2015). *Penulisan Artikel ilmiah untuk Bidang Keperawatan dan Kesehatan*. Jakarta: PT Rajafindo Persada.
- Ahmad Nur Ihsan. 2018. Analisis Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Gerbang Lentera Sebagai Penggerak Desa Wisata Lerep. Departemen Ilmu Politik dan Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik .Penelitian Pengabdian Masyarakat. Universitas Diponegoro.
- Al-Bahra Bin Ladjamudin. 2013. Analisis dan Desain Sistem Informasi. Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Azhar, Susanto. (2013), Sistem Informasi Akuntansi, -Struktur-Pengendalian- Resiko-Pengembangan, Edisi Perdana, Lingga Jaya, Bandung.
- Bahri, Syaiful. (2016). *Pengantar Akuntansi*. Cetakan Pertama. Yogyakarta: CV. Andi Offset).
- Hamdayama, J. (2016). *Metodologi Pengajaran*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Handayani, B., Moekahar, F., Daherman, Y., Alfani, M. H., (2020). Social Media Marketing Sebagai Sarana Pengembangan Kewirausahaan Berbasis Sociotechnopreneurship di Universitas Islam Riau. *Jurnal Riset Komunikasi*, 3 (2):177–193. <https://doi.org/https://doi.org/10.24329/jurkom.v3i2.163>
- Hardin. (2019). Pembinaan Pengurus Persaudaraan Beladiri Kempo Indonesia (Perkemi) Dojo Sorawolio Dalam Melaksanakan Peran dan Fungsi Manajemen Organisasi. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Membangun Negeri*. 3 (1): 1-15.
- James, A Hall. (2011). Sistem Informasi Akuntansi, Edisi 4, Jakarta: Salemba Empat

- Kasandra, Ayu Ari. (2016). Pengaruh Kualitas Penerapan SIA, Pemanfaatan, Dan Kepercayaan Teknologi Informasi Pada Kinerja Karyawan. ISSN: 2303-1018 E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana 8.3 Vol 14.1. Januari 2016: 539-547
- Laporan Kinerja BPKP Provinsi Gorontalo, 2020
- Mamahit, Patricia,. H. Sabijono. dan L. Mawikere. (2014). *Evaluasi Sistem Informasi Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Rawat Inap Pada RSUP Prof. Dr. R. D. Kandou. Manado. Journal Riset Akuntansi Going Concern. Vol 2. No 4. Universitas Sam Ratulangi*
- Mulyadi. (2016). Sistem Informasi Akuntansi. Jakarta: Salemba Empat.
- Nasiwan, (2012). *Teori-Teori Poiltik*. Yogyakarta: Ombak.
- Nuraeni, S. D., & Suryawardani, B. (2017). Analisis Efektivitas Promosi Melalui Media Sosial Instagram Pada Pt.Niion Indonesia Utama Pada Tahun 2017. *E-Proceeding Applied Science*. 2 Agustus 2017, Bandung, Indonesia. pp.280–285.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang *Standar Akuntansi Pemerintahan*
- Rahmawati, Emma. (2020). Analisis Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bum Desa) Di Kabupaten Bandung Barat. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis Volume 25 No. 1*
- Umar, Sako dan Felmi Lantowa. (2018). Pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan terhadap kualitas penyajian laporan keuangan pada Pemerintah Kabupaten Gorontalo. *Journal Of Accounting Science* Vol. 2 No. 1 EISSN 2548-3501
- Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 junto UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah